

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Apabila dilihat secara keseluruhan, bisa dikatakan hampir sebagian besar pelaku usaha pemula di Indonesia telah memiliki kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Hasil *crosstab* dari setiap indikator mencerminkan adanya tendensi keterkaitan antara 1 indikator dengan indikator lainnya seperti *perceived opportunity* dan *self-efficacy*. Pelaku usaha yang memiliki kemampuan melihat peluang cenderung memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk memulai usaha, begitupun sebaliknya.

Lebih lanjut, kecenderungan yang signifikan terjadi pada pelaku usaha yang memiliki *self-efficacy*, *perceived opportunity* dan *role model* punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, dapat ditarik gagasan bahwa pendidikan yang tinggi mampu memberikan pengetahuan, keterampilan, dan semakin luasnya pergaulan yang memperbesar peluang untuk mendapatkan panutan yang cocok bagi individu untuk memulai usaha.

Hasil yang menarik ditemukan dari hasil *crosstab fear of failure*. *Fear of failure* memiliki perbedaan pola yang sangat signifikan ketika pelaku usaha tersebut memiliki *self-efficacy* sementara tidak ada perbedaan sama sekali untuk indikator tingkat pendidikan dan *role model*. Maka dari itu, diduga bahwa dengan adanya *self-efficacy* pada diri pelaku usaha pemula mampu mengurangi rasa takut gagal.

Kemudian, dapat disimpulkan bahwa memang sampai saat ini kurikulum pendidikan di sekolah dasar dan regulasi pajak di Indonesia belum mendukung

pelaku usaha pemula '*nascent entrepreneurs*' dikarenakan implementasi kurikulum pendidikan kewirausahaan yang sudah diatur dalam Permendikbud No 24 Tahun 2016 belum diterapkan secara optimal. Mengingat dibebaskannya metode pembelajaran serta sistem penilaian kepada guru yang umumnya masih bersifat konvensional sementara pembelajaran kewirausahaan tidak hanya membutuhkan pengetahuan saja melainkan juga memerlukan praktikum untuk menambah *softskill* seperti *leadership*, *decision making*, *risk taking*, dsb yang dirasa masih belum terpenuhi dari metode pembelajaran konvensional. Perlu adanya perubahan atau metode pembelajaran yang berbeda untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan agar pelajar benar-benar dihadapkan dengan dunia kewirausahaan. Kompetensi guru yang mengajar kewirausahaan juga diragukan oleh sebagian besar narasumber karena umumnya para pengajar ini hanyalah guru biasa yang tidak memiliki pengalaman dalam berwirausaha sehingga ilmu yang diberikan sangat teoritis. Padahal, melalui mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini seharusnya pelajar diperkenalkan dan dipromosikan mengenai dunia kewirausahaan sehingga memancing minat dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar sedini mungkin.

Selain itu, masih juga terdapat ketimpangan regulasi pajak khususnya mengenai besaran pajak yang harus dibayarkan oleh pelaku usaha pemula. Regulasi pajak yang diatur dalam PP No 46 Tahun 2013 dirasa lebih mendukung pelaku usaha yang sudah *established* dibandingkan dengan pelaku usaha pemula yang baru saja merintis usahanya. Hal ini dikarenakan pelaku usaha yang baru saja memulai usaha dengan kondisi pendapatan yang umumnya masih minim dan arus kas masih negatif diminta untuk membayar pajak berdasarkan pendapatan kotor yang

diterimanya.

5.2 Saran

Demi terciptanya lingkungan yang mampu mendukung pertumbuhan pelaku usaha pemula di Indonesia, maka semua pemangku kepentingan khususnya pemerintah harus bekerja sama dalam membangun ekosistem kewirausahaan yang ideal. Dalam hal ini, salah satu peran yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan mengkaji ulang atau mengevaluasi penerapan kurikulum 2013 revisi 2017 terkait pendidikan kewirausahaan di pendidikan dasar.

Pemerintah dapat mengikuti metode pembelajaran BTEC yang dibentuk oleh lembaga pendidikan Pearson PLC. Pearson PLC merupakan perusahaan multinasional terbesar di dunia yang bergerak dibidang pendidikan dan penerbitan yang berpusat di London. Pada dasarnya, kualifikasi BTEC serupa dengan kualifikasi pada umumnya, namun kualifikasi BTEC lebih spesifik pada mata pelajaran kejuruan (seperti *art & design, business, hospitality, dsb*) sehingga metode pembelajaran yang diterapkan lebih banyak menggunakan praktikum dibandingkan dengan ujian tertulis. Para pengajar BTEC juga merupakan orang-orang yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya masing-masing. Mengacu dari penjabaran di atas, sekolah dapat bekerja sama dengan para pelaku usaha di daerahnya dengan mengajak pelajar untuk mengunjungi tempat usaha tersebut dan mengamati proses bisnis yang ada. Para pelaku usaha diminta untuk membagikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang didapat selama merintis usaha kepada para pelajar sehingga pelajar merasakan secara langsung gambaran mengenai kewirausahaan yang tentunya meningkatkan *self-efficacy* pelajar. Dalam

hal ini, pelaku usaha secara tidak langsung menjadi pengajar kewirausahaan dan sekaligus menjadi *role model* bagi pelajar. Setelah para pelajar diberikan wawasan tersebut, maka pelajar tersebut dapat diarahkan untuk magang di tempat para pelaku usaha untuk terjun langsung merasakan proses bisnis yang ada. Hal ini tentu dapat memperkenalkan dan mempromosikan pelajar akan dunia usaha secara nyata. Selain memberikan manfaat yang besar bagi pelajar, pelaku usaha juga diuntungkan dengan mendapatkan bantuan tenaga dan ide dari pelajar yang magang sehingga menjadi kerja sama yang bersifat *win-win solution*.

Lebih lanjut, untuk memastikan kualitas peserta dan standard penilaian yang dilakukan telah sesuai atau tidak, BTEC menerapkan *quality assurance*. *Quality assurance* tersebut meliputi *Standards Verification* (mengutus *standard verifier* untuk memberikan penilaian dan *feedback* terhadap peserta BTEC apakah sudah sesuai dengan standar nasional), *Quality Management Review* (kunjungan secara berkala (tahunan) untuk mengecek apakah peserta telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan prosedur), dan *Academic Management Review* (Kunjungan untuk memastikan bahwa peserta memahami persyaratan untuk mengelola dan mendapatkan kualifikasi lanjutan ke tingkat yang lebih tinggi). Disinilah guru dapat berperan sebagai *standard verifier* yang memastikan bahwa pelajar mendapatkan kompetensi sesuai dengan rumusan dalam kurikulum. Oleh karenanya, maka pemerintah perlu terlebih dahulu memberikan pelatihan kepada guru-guru yang mengampu bidang kewirausahaan seputar cara menilai kemampuan pelajar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelajar menerima kompetensi sesuai dengan yang diharapkan dalam kurikulum. Apabila hal ini dapat diterapkan, maka sistem pembelajaran akan menjadi lebih efektif karena pelajar mendapatkan ilmu dengan

cara yang berbeda dan tentunya sangat berguna setelah mereka lulus sekolah terutama sebagai calon pengusaha. Pelaku usaha diperbantukan dengan adanya pelajar yang magang dan pekerjaan guru juga akan menjadi lebih optimal karena bertugas sebagai *observer* dan *standard verifier*. Hal ini juga dapat menjawab keraguan sebagian pihak yang merasa bahwa guru tidak memiliki kompetensi yang cukup mengenai dunia kewirausahaan secara nyata. Oleh karenanya, peran guru sebagai *standard verifier* akan menjadi lebih sesuai dengan kompetensi yang dimiliki seorang guru.

Terkait dengan regulasi perpajakan terutama dalam aturan PP 46 Tahun 2013, sepertinya pemerintah perlu menerapkan besaran peredaran bruto sebagai dasar perhitungan pajak disesuaikan dengan industri pelaku usaha untuk meminimalisir ketimpangan pajak. Hal ini dapat dilakukan mengikuti pada ketentuan dasar besaran peredaran bruto dalam ketentuan perhitungan pajak menggunakan norma. Misalnya saja untuk industri retail dasar perhitungan brutonya adalah 20% dari omset sementara untuk industri *food and beverage* adalah 100% dari omset. Apabila dicontohkan kedua pelaku usaha yang masing-masing bergerak di industri tersebut mendapatkan omset sebesar Rp200.000.000,- dalam satu bulan, maka besar pajak yang harus dibayar pelaku usaha di industri retail adalah $1\% \times (20\% \times \text{Rp}200.000.000,-)$ sebanyak Rp 400.000,- dan untuk pelaku usaha yang bergerak di industri food and beverage adalah $1\% \times (100\% \times \text{Rp}200.000.000,-)$ sebesar Rp2.000.000,-. Ini tentu dirasa lebih adil bagi pelaku usaha terutama yang memiliki margin profit yang kecil.

Untuk mengatasi permasalahan pelaku usaha yang mengalami kerugian dan dialami oleh pelaku usaha pemula, maka dukungan yang dapat diberikan

pemerintah adalah dengan memberikan insentif pajak berupa pembebasan pajak. Berikan pelaku usaha kesempatan untuk mengembangkan usahanya dalam kurun waktu 1-2 tahun dimana pada saat yang bersamaan, pelaku usaha didampingi oleh fiskus untuk diberikan sosialisasi dan pengajaran terkait kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan usaha yang sedang dijalankan. Maka pada tahun ketiga pelaku usaha sudah dapat membayar pajak dengan tepat. Bagi pelaku usaha, ini tentu akan sangat membantunya dalam merintis usaha sekaligus mampu menjalankan kewajiban usahanya. Sementara bagi pemerintah, dalam waktu 1-2 tahun pertama memang akan mengalami potensi pengurangan penerimaan pajak dari para pelaku usaha pemula, akan tetapi hasil ini tentu akan sebanding pada waktu tahun ketiga dimana usaha yang dirintisnya telah stabil dan telah memang memahami dan membayarkan pajak secara tepat sehingga potensi penerimaan pajak di masa mendatang lebih besar karena terbantunya pelaku usaha pemula dalam merintis usaha.

Di lain sisi, penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar karakteristik pelaku usaha memiliki latar belakang pendidikan SMA. Oleh karenanya, pemerintah perlu juga untuk memberikan sosialisasi mengenai dasar-dasar perpajakan secara umum (meliputi Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Bea Materai) ke sekolah-sekolah yang intinya memperkenalkan bahwa terdapat pajak dalam setiap kegiatan usaha yang dilakukan. Sehingga, ketika mereka menjadi pelaku usaha, mereka sudah tahu dan menyadari bahwa terdapat kewajiban pajak yang harus mereka patuhi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amatucci, F. M., & Crawley, D. C. (2011). Financial *self-efficacy* among women entrepreneurs. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 3(1), 23-37. doi:10.1108/17566261111114962
- Anggraeni, D. A., & Nurcaya, I. (2016). Peran Efikasi Diri dalam Memediasi Pengaruh Pendidikan Kewirausahaan Terhadap Niat Beriwirausaha. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(4), 2424-2453.
- Arthur, S. J., Hisrich, R. D., & Cabrera, Á. (2012). The Importance of Education In the Entrepreneurial Process: A World View. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 19(3), 500-514.
- Basheer, A.-h., & Sulphrey, M. M. (2017). Entrepreneurship Curriculum in Management Programmes: Benchmarking with the Curricula of Top International Universities. In M. J. Manimala, & P. Thomas, *Entrepreneurship Education: Experiment with Curriculum, Pedagogy, and Target Groups* (pp. 121-165). India: Springer.
- Berger, P. K. (2014). The Role of Fear For Entrepreneurial Venture Creation - Causes of Failure Before and After Foundation.
- Bosma, N., Hessels, J., Schutjens, V., van Praag, M., & Verheul, I. (2011). Entrepreneurship and *Role models*. *Journal of Economic Psychology*. Retrieved from <http://www.dsf.nl/>
- Brookes, M., Altinay, L., Wang, X. L., & Yeung, R. (2016). Opportunity identification and evaluation in franchisee business start-ups. *Journal of Service Theory and Practice*, 26(6), 889-910.
- BSI Entrepreneur Centre. (2016). *BSI Entrepreneur Centre*. Retrieved from <http://bec.bsi.ac.id/baca-artikel/2016/11/apa-kewirausahaan-itu-penting-dalam-kehidupan-kita#.Wc8ZSmiCxPY>
- Bygrave, W. D. (2010). The Entrepreneurial Process. In *The Portable MBA in Entrepreneurship* (4th ed., pp. 1-26).
- Cacciotti, G., & Hayton, J. C. (2014). *Fear of failure* and Entrepreneurship: A Review and Direction for Future Research. *ERC Research Paper*, 1-61. Retrieved from www.enterpriseresearch.ac.uk
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. SAGE Publication.
- Davidsson, P. (2006). Nascent Entrepreneurship: Empirical Studies and Developments. *Foundation and Trends in Entrepreneurship*, 1-76.
- Davidsson, P., & Honig, B. (2003). The Role of Social and Human Capital among

- Nascent Entrepreneurs. *Journal of Business Venturing* , 18(3), 301-331.
- Dempsey, D., & Jennings, J. (2014). Gender and entrepreneurial *self-efficacy*: a learning perspective. *International Journal of Gender and Entrepreneurship*, 6(1), 28-49.
- Drnovšek, M., Wincent, J., & Cardon, M. S. (2010). Entrepreneurial *self-efficacy* and business start-up: developing a multi-dimensional definition. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 16(4), 329-348.
- Drnovšek, M., Wincent, J., & Cardon, M. S. (2010). Entrepreneurial *Self-efficacy* and Business Start-up: Developing A Multi-Dimensional Definition. *International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research*, 16(4), 329-348.
- GEM. (2017). *gemconsortium.org*. Retrieved 2017, from <http://www.gemconsortium.org/about/news>
- Hanif, M. (2013). Peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia (Satu setengah dekade pasca krisis ekonomi 1997). Retrieved from <https://www.scribd.com/doc/102335452/Usaha-Mikro-Kecil-dan-Menengah-UMKM-di-Indonesia#>
- Heinonen, J., Hytti, U., & Stenholm, P. (2011). The role of Creativity in Opportunity Search and Business Idea Creation. *Education + Training*, 53(8/9), 659-672.
- Hietanen, L., & Järvi, T. (2015). Contextualizing Entrepreneurial Learning in Basic and Vocational Education. *Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy*, 9(1), 45-60.
- Karimi, S., Biemans, H. J., Lans, T., Chizari, M., & Mulder, M. (2014). Effects of *role models* and gender on students' entrepreneurial intentions. *European Journal of Training and Development*, 38(8), 694-727.
- Kemenperin. (2012). Retrieved from kemenperin.go.id: <http://kemenperin.go.id/artikel/3241/ghs>
- Kementerian Keuangan. (2008). Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Indonesia.
- knowledgiate. (2016). Retrieved from <http://www.knowledgiate.com/canons-of-taxation/>
- Krueger, N., & Dickson, P. R. (1994). How Believing in Ourselves Increases Risk Taking: Perceived *Self-efficacy* and Opportunity Recognition. *Decision Sciences*, 385-400.

- Kvedaraite, N. (2014). Reasons and obstacles to starting a business: Experience of students of Lithuanian higher education institutions. *Management: journal of contemporary management*, 1(19), 1-16.
- Lafuente, E. M., & Vaillant, Y. (2013). Age driven influence of role-models on entrepreneurship in a transition economy. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 20(1), 181-203.
doi:10.1108/14626001311298475
- Lougui, M., & Nyström, K. (2014). What Obstacles Do Entrepreneurs Encounter? *Journal of Entrepreneurship and Public Policy*, 3(2), 275-291.
- Lukeš, M., & Zouhar, J. (2016). The Causes of Early-Stage Entrepreneurial Discontinuance. 25(01), 19-36. doi:DOI: 10.18267/j.pep.534
- Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship.
- Mateo, J. M., Solves, I. M., J. M., & G. G. (2013). Influence of the economic cycle on the determinants of nascent entrepreneurial activity. An empirical *analysis* of the Spanish case. *Investigaciones Regionales*, 26, 19-45.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2013). Keputusan DIrektur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7013/D/KP/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). Permendikbud No 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
- Nawangpalupi, C. B., Pawitan, G., Gunawan, A., Widyarini, M., Putri, F. E., & Iskandarsjah, T. (2016). *Entrepreneurship in Indonesia: Condition and Opportunities for Growth and Sustainability*. Bandung: Unpar Press.
- Pajak.go.id. (2013). Retrieved 2017, from Pajak.go.id:
<http://www.pajak.go.id/sites/default/files/Leaflet%20PP%2046-UMKM.pdf>
- Pajak.go.id. (2017). e-filing. Retrieved from <http://www.pajak.go.id/e-filing>
- Peake, W. O., & Marshall, M. I. (2006). What Do We Really Know About Entrepreneurs? An *Analysis* of Nascent Entrepreneurs in Indiana.
- Peraturan Pemerintah. (2013). Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Indonesia.
- Saade, F. P. (2013). Towards Understanding Nascent Entrepreneurship: A Theory

of Planned Behavior Perspective.

- Sari, E. V., & Jati, G. P. (2016). Retrieved from CNNIndonesia.com:
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160223145910-78-112928/pemerintah-kaji-ulang-pph-1-persen-untuk-usaha-kecil-menengah/>
- Sekaran, U. (2003). *Research Methods For Business: A Skill Building Approach* (4th ed.). United States of America: John Wiley & Sons, Inc.
- Shamsudin, S. F., Mamun, A. A., Nawi, N. C., Nasir, N. A., & Zakaria, M. N. (2016). Policies and Practices for Entrepreneurial Education in Malaysia: A Review. *Mediterranean Journal of Social Sciences*(7), 36-41. doi:10.5901/mjss.2016.v7n2p36.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmanto. (2013). Retrieved from Pajak.go.id:
<http://www.pajak.go.id/content/article/melalui-pajak-kita-membangun-negeri>
- Suryana. (2006). *Kewirausahaan Pedoman Praktis: Kiat dan Proses Menuju Sukses*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tambunan, R. (2013). Retrieved from Ortax.org:
<http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51>
- Undang-Undang. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Indonesia.
- Wagner, J. (2005). Discussion Paper Series: *Nascent Entrepreneurs*. Retrieved from semanticscholar.org:
<https://pdfs.semanticscholar.org/d5c8/417f5f1c8035abf0a01fd21cc104d72a6f88.pdf>
- Wahyono, B. (2014). Kurikulum Pendidikan Kewirausahaan. Retrieved from Pendidikanekonomi.com:
<http://www.pendidikanekonomi.com/2014/08/kurikulum-pendidikan-kewirausahaan.html>
- Wicaksono, P. E. (2017). Retrieved from liputan6.com:
<http://bisnis.liputan6.com/read/2882604/jumlah-pengusaha-ri-meningkat-tapi-masih-kalah-dari-malaysia>
- Yin, R. K. (2011). *Qualitative Research From Start to Finish*. New York: The Guilford Press .
- Ziemiański, P., & Zięba, K. (2012). Nascent Entrepreneurship and The Role of *Self-efficacy*. *Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce – teoria i praktyka*(1), 27-36.